



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUYUN AYUNAH

2. Jabatan : LURAH

3. NHK : **222889** 

#### II. DATA HARTA

## A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.780.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA
   JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/86 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA

  JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

# B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 215.000.000

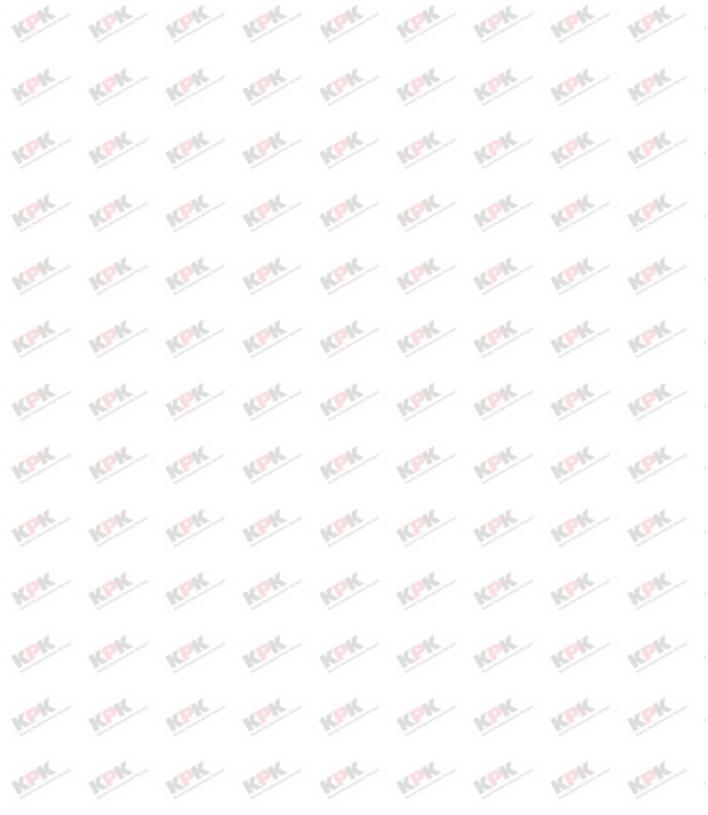
- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- 2. MOBIL, CAMRY CAMRY HITAM Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
- 3. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	W.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.200.241
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Kon Kon
Sub Total	Rp.	2.032.900.241
III. HUTANG	Rp.	600.000 <mark>.00</mark> 0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.432.900.241





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LEMBAGA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

: ADMIRAL 1. Nama

: SEKRETARIS KELURAHAN 2. Jabatan

3. NHK : 226891

#### II. DATA HARTA

# A. TANAH DAN BANGUNAN

2.375.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

- Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- 3. Tanah Seluas 9750 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
- Bangunan Seluas 26 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

# B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

374.000.000

- MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
- MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
- MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
- MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA 157.200.000 Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS 936.779.500 Rp.





F. HARTA LAINNYA	Rp.	all with
Sub Total	Rp.	3.842.979.500
III. HUTANG	Rp.	al all
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.842.979.500

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id</u>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  - 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA **LEMBAGA** 

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

: HARRY RINALDI 1. Nama

: KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN 2. Jabatan

3. NHK : 228724

#### II. DATA HARTA

925.000.000 A. TANAH DAN BANGUNAN

Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/22 m2 di KAB / KOTA BOGOR,

HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/40 m2 di KAB / KOTA BOGOR,

HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 47.500.000

MOBIL, DAIHATSU AYLA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI

Rp. 30.000.000

MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

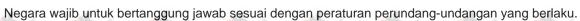
MOTOR, SUZUKI UX 110 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	61.500.000
D.	SURAT BERHARGA			Rp.	
E.	KAS DAN SETARA KAS	KPK	KPK	Rp.	236.927.000
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	110.000.000
14	Sub Total	JOK.	-No	Rp.	1.380.927.000
III. HU	TANG			Rp.	20.000.000
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	al.	al.	Rp.	1.360.927.000

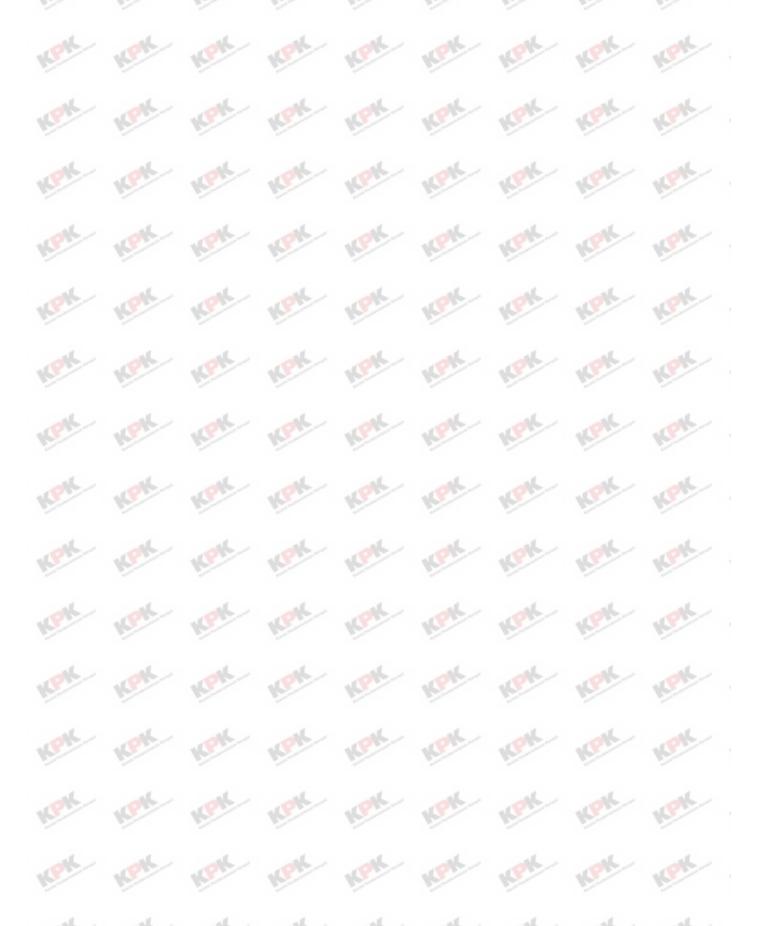
<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara







- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.









(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA LEMBAGA

**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

: SRI WULANDARI 1. Nama

: KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 2. Jabatan

3. NHK : 757566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 950.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN 186.100.000

MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 1.200.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI

Rp. 3.000.000

MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000

MOTOR, YAMAHA B6H-AI AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

26.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	W
Sub Total	Rp.	1.149.350.000
III. HUTANG	Rp.	253.275.922
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	896.074.078

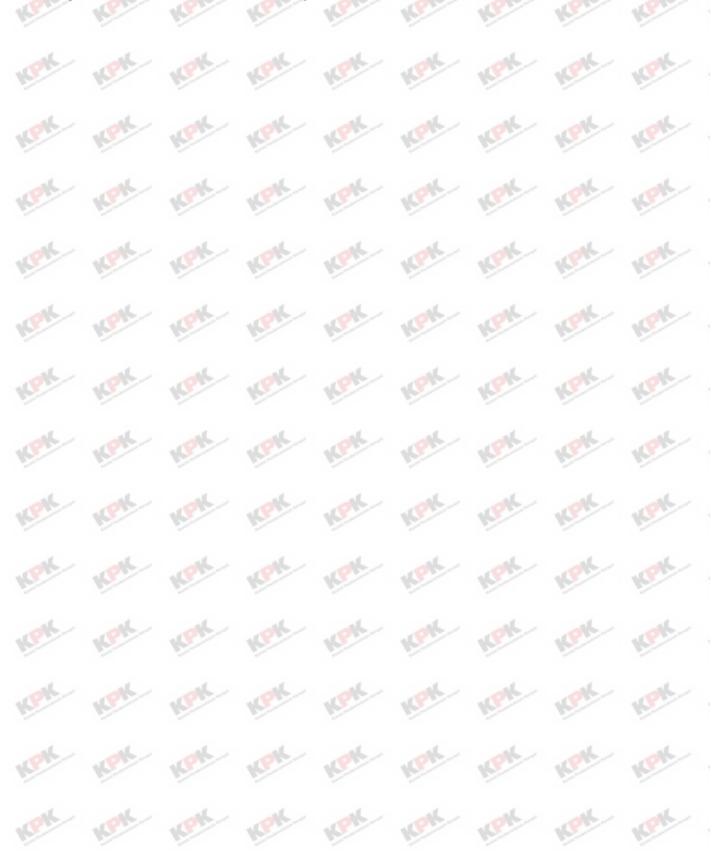
<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.







# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVI NURLELA

2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT** 

3. NHK : 214566

### II. DATA HARTA

# A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.180.915.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA
   JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.068.415.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
  JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
- 5. Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,
  HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000
- 6. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA

  JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
   TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

## **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

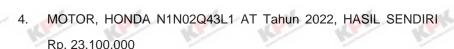
Rp.

478.900.000

- 1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5LULT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO D1A02N19M1AT Tahun 2019, HASIL
   SENDIRI Rp. 12.800.000
- MOTOR, HONDA PCX V1J02Q32L0AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.600.000







- MOTOR, HONDA A1F02N36M1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.400.000
- MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 NEW S CVT GR SPORT 3 AB Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 227.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	25.200.000
D.	SURAT BERHARGA	- N	- N	Rp.	at at
E.	KAS DAN SETARA KAS	M	M	Rp.	68.778.357
F.	HARTA LAINNYA	of .	all .	Rp.	al . al
PI	Sub Total	KPI	KPA	Rp.	2.753.793.357
III. HU	TANG			Rp.	245.156.255
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	KPK	KPK	Rp.	2.508.637.102

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

814.838.000





# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**BENDAHARA** 

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

2. Jabatan

1. Nama : YOMI KARTIKA

3. NHK : 739746

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN P22.677.000

Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA
 JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 922.677.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	33.661.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	KON KON
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	JOH JOH
Sub Total	Rp.	982.838.000
I. HUTANG	Rp.	168.000.000

#### Catatan:

Ш

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <a href="elhkpn.kpk.go.id">elhkpn.kpk.go.id</a>, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.